

S K R I P S I

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK



OLEH

SUTRI ASIH

NIM : 10675005129

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2 0 1 0**

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA BANJAR SEMINAI
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK
Oleh
SUTRI ASIH

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat di desa merupakan wahana yang melaksanakan demokrasi. Bahkan secara subtentif, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari kepala Desa. Dari prospektif politik, BPD memiliki otoritas politik yang sangat kuat, otonom dan independent dalam menjalankan fungsinya. Fungsi BPD terdiri dari mengayomi masyarakat, legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan dan mengetahui hambatan-hambatan fungsi BPD di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupten Siak, karena sejak BPD dibentuk dalam menjalankan fungsinya belum memperlihatkan hasil yang sangat signifikan. Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan anggota BPD Banjar Seminai. Berpegang pada prinsip rasionalitas dan untuk mendukung validitas hasil penelitian ini, maka ditetapkan sampel 44 orang dari masyarakat dan 9 orang dari BPD, sedangkan teknik penarikan sampel yang menggunakan teknik sensus untuk BPD sementara masyarakat dengan rumus Slovin. Data yang digunakan yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber dan informan melalui observasi, kuesioner, serta wawancara. Kemudian data sekunder yakni data yang sudah diolah dalam bentuk naskah dan dokumentasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak kebanyakan cukup berjalan sesuai dengan fungsi BPD, untuk fungsi mengayomi berjalan baik, legislasi kurang berjalan dengan baik, pengawasan berjalan baik, dan menyampaikan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik. Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka perlu diadakannya pelatihan dan pembinaan kepada anggota BPD agar mereka benar-benar mengetahui dan menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga pembangunan di Desa Banjar Seminai dapat berjalan dengan baik pula dalam memajukan Desa Banjar Seminai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	iii
DAFTAR TABEL -----	v
BAB I PENDAHULUAN -----	1
I.1. Latar Belakang Masalah -----	1
I.2. Perumusan Masalah -----	10
I.3. Tujuan Penelitian -----	10
I.4. Manfaat Penelitian -----	11
I.5. Sistematika Penulisan -----	11
BAB II TELAAH PUSTAKA -----	13
II.1. Teori -----	13
II.1.1. Pengertian Peranan-----	13
II.1.2. Pengertian Pengawasan -----	14
II.1.3. Pengertian Pembangunan Desa -----	15
II.1.4. Pengertian Pemerintahan Desa-----	19
II.1.5. Fungsi BPD -----	25
II.2. Defenisi Konsep-----	29
II.3. Defenisi Operasional -----	30
II.4. Hipotesa -----	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN-----	36
III.1. Lokasi dan Waktu Penelitian-----	36
III.2. Jenis Dan Sumber Data -----	36
III.3. Metode Pengumpulan Data-----	36
III.4. Populasi dan Sampel -----	37
III.5. Analisa Data -----	38
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN-----	39
IV.1. Keadaan Geografis-----	39
IV.2. Keadaan Penduduk -----	40
IV.3. Gambaran Umum BPD -----	44
BAB V HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN-----	58
V.1. Identitas Responden -----	58

V.2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak -----	63
V.2.1. Mengayomi -----	64
V.2.2. Legislasi -----	69
V.2.3. Pengawasan -----	76
V.2.4. Menyampaikan aspirasi masyarakat -----	80
V.3. Rekapitulasi Tanggapan responden tentang Pelaksanaan Fungsi BPD dalam pembangunan di Desa Banjar Seminai -----	86
V.4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Banjar Seminai -----	90
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN -----	94
VI.1. Kesimpulan -----	94
VI.2. Saran-Saran -----	96
Daftar pustaka	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang terdapat pada Pasal 10 ayat 2 yaitu Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembentukan daerah Otonom pada dasarnya untuk meningkatkan partisipasi dan taraf hidup masyarakat, sesuai dengan potensi yang berkembang disuatu wilayah, maksud dibentuknya daerah otonom baru adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

Indonesia adalah sebagai salah satu negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik itu ekonomi, politik, sosial budaya serta agama dan Pertahanan keamanan. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, suksesnya pembangunan yang telah ada dan akan dilaksanakan sudah barang tentu tidak akan terlepas dari masyarakat Indonesia. Secara umum masyarakat sebagai objek dan pelaksanaan pembangunan sudah sewajarnya turut berperan serta dalam mensukseskan segala program pemerintah yang akan

dilaksanakan, oleh karenanya pemerintah dalam gerak pembangunannya senantiasa mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan, terutama dalam masyarakat pedesaan, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri.

Dari berbagai konsep pembangunan yang dikemukakan para ahli memberikan pembangunan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk merubah suatu kondisi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan di masyarakat.

Secara histories, desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia. Jauh sebelum negara dan pemerintahan ini terbentuk, etensitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, merupakan telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat, secara relatif mandiri dari campur tangan etensitas kekuasaan dari luar.

Adanya kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Maksud dan tujuan UU tersebut adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri.

Sejak berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, masyarakat daerah menaruh harapan terhadap implementasi otonomi daerah. Tak terkecuali masyarakat ditingkat desa. Kehadiran otonomi daerah bagi setiap warga di desa memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Sebab, masyarakat desa sangat sadar bahwa keberadaan institusi – institusi demokrasi desa selama ini berada dalam posisi yang sangat tidak kondusif dalam mendorong penegakan demokrasi pada masyarakat pedesaan.

Konsekuensi implementasi otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004 mengenai pemerintah desa, terdapat dalam pasal 206 yaitu

mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Kemudian dalam pasal 208 terdapat tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin desa dengan otonom karena kedudukan desa yang tidak lagi di bawah Kecamatan. sedangkan fungsi kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinatif di wilayah kecamatan, sesuai dengan status kecamatan yang tidak lagi menjadi sebuah wilayah kekuasaan melainkan sekedar sebagai perpanjangan dari kabupaten.

Kembali ke Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tertera jelas bahwa keberadaan lembaga legislatif desa memiliki kedudukan, wewenang, hak dan fungsi yang sangat berbeda di bandingkan masa lalu. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat di desa merupakan wahana yang melaksanakan demokrasi. Bahkan secara substantif, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari kepala Desa. Dari prospektif politik, BPD memiliki otoritas politik yang sangat kuat, otonom dan independent dalam menjalankan fungsinya.

Adanya Otonomi daerah melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bukan hanya menyangkut perubahan sistem dan struktur pemerintahan daerah, melainkan juga manajemen pemerintahan daerah terutama menyangkut kesiapan, ketersediaan dan teknik menggerakkan sumber daya aparatur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan yang kuat, efektif, efisien dan memiliki akuntabilitas.

Hakikat otonomi daerah adalah efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, di samping untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi, dan bila dikaitkan dengan pemerintahan desa yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, maka sejalan dengan otonomi daerah di maksud, upaya untuk memberdayakan pemerintah desa harus dilaksanakan, karena posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat, maka pemerintah desa selaku Pembina, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat secara teoritis sangat berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana Pemerintah Desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan

masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah kevakuman.

Oleh karena itu, kehadiran BPD di level desa hendaknya di arahkan pada membangun hubungan bersinerjis antara pihak legislatif dan eksekutif tanpa menimbulkan goncangan. Terbentuknya BPD mestinya mendorong terciptanya *partnership* antara Kepala Desa dan BPD yang harmonis dari pada “konfrontatif”.

Dan pada tahun 2000, di Desa Banjar Seminai telah terbentuk Badan Perwakilan Desa seiring dengan berlakunya Undang – Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi dengan adanya Undang – Undang No.32 Tahun 2007, maka yang dahulunya Badan Perwakilan Desa sekarang diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga Lahirnya BPD memberikan peluang dan harapan untuk terciptanya demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banjar Seminai berjumlah 9 orang, sebagai organisasi yang lahir di Era Reformasi. Namun perkembangan yang terjadi di Desa Banjar Seminai tidaklah seperti yang di harapkan.

Desa Banjar Seminai terletak di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura tepatnya di kilo 65. Masyarakat Desa banjar seminai berdinamika, beragama suku, adat istiadat dan kebudayaan, karena Desa banjar seminai dulunya adalah ekstrasmigrasi, maka dengan seiring berjalannya waktu banyak terjadi perpindahan penduduk yang mengakibatkan masyarakat Desa Banjar Seminai beragam suku.

Dilihat dari segi pembangunan fisik di Desa Banjar Seminai. dalam penelitian ini penulis mengambil data pelaksanaan pembangunan yang tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel I.1 : Data Pelaksanaan pembangunan antara target dan realisasinya Tahun 2008 di Desa Banjar Seminai

Pelaksanaan pembangunan	Target	Realisasi
Perbaikan jalan Desa	2000 M	1000 M
Pembuatan Pagar Desa	2000 M	1000 M
Rehab Mesjid	Rp 35.000.000	Rp 25.000.000
Pembangunan Lokasi PLTD	Rp 150.000.000	Rp 92.000.000
Pembuatan Gedung TK	Rp 90.000.000	Rp 50.000.000
Pembuatan Gedung PAUD	Rp 50.000.000	Rp 36.000.000

Sumber: Data Penelitian 2010.

Dari uraian tabel diatas dapat dijelaskan bahwasanya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Banjar Seminai telah dilaksanakan tapi belum efektif, karena dari perbaikan jalan Desa yang targetnya 2000 M hanya terealisasi 1000 M, pembuatan pagar Desa yang targetnya 2000 M hanya terealisasi 1000 M, rehab mesjid yang targetnya Rp 35.000.000 hanya terealisasi Rp 25.000.000, pembangunan lokasi PLTD yang targetnya Rp 150.000.000. hanya terealisasi Rp 92.000.000, pembuatan gedung Tk yang targetnya Rp 90.000.000 hanya terealisasi Rp 50.000.000, pembuatan gedung PAUD yang targetnya Rp 50.000.000 hanya terealisasi Rp 36.000.000.

Dalam pelaksanaan pembangunan diatas diperlukan fungsi dari BPD yaitu untuk mengawasi jalannya pembangunan terutama mengenai dana untuk

pembangunan agar tidak terjadi penyelewengan. Dan pembangunan dapat berjalan dengan baik yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat di Desa Banjar Seminal.

Penulis juga melakukan pengamatan BPD dalam menjalankan rapat, dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel I.2 : Tingkat Kehadiran Anggota BPD dalam Kegiatan Rapat Di Desa Banjar Seminal.

NO	Jumlah Anggota	Tanggal Rapat	Jumlah Yang Hadir	Jumlah Yang Tidak Hadir
1	9	4-12-2008	4	5
2	9	25-02-2009	3	6
3	9	8-08-2009	3	6
4	9	20-09-2009	4	5
5	9	2-10-2009	4	5

Sumber : Data Lapangan Tahun 2010.

Dari tabel diatas dilihat bahwa dalam lima (5) kali kegiatan rapat yang di adakan, terdapat anggota BPD yang tidak hadir. Di mana pada tanggal 4 Desember 2008 dari 9 orang anggota hanya 4 orang yang mengikuti rapat, tanggal 25 Februari 2009 dari 9 orang anggota hanya 3 orang yang hadir. tanggal 8 Agustus 2009 dari 9 orang anggota hanya 3 orang yang hadir. Tanggal 20 September 2009 dari 9 orang dan pada tanggal 2 Oktober 2009 dari 9 orang anggota hanya 4 orang yang hadir.

Dalam pelaksanaan pembangunan juga di butuhkan ketertiban dan tanggung jawab BPD itu sendiri, agar dapat terbagunnya kesejahteraan masyarakat desa banjar seminai.

Penulis juga melakukan pengamatan BPD dalam kehadiran rapat yang di selenggarakan oleh Kepala Desa yaitu sebagai berikut :

Tabel I.3 : Tingkat Kehadiran Anggota BPD dalam Kegiatan Rapat Yang Di Selenggarakan Kepala Desa Di Desa Banjar Seminai.

No	Tanggal	Jenis rapat	Jumlah anggota rapat			tempat
			masyarakat	BDP	RT/RW	
1	12-11-2008	Rapat akhir tahun pembukuan pengeluaran keuangan desa banjar seminai.	10	3	10	Balai desa
2	19-10-2008	Rapat pembahasan keamanan atau pembangunan.	10	2	10	Kantor desa
3	3-01-2009	Rapat untuk melakukan gotong royong.	10	4	10	Balai desa
4	10-04-2009	Rapat untuk membahas mendirikan PLTD.	10	5	10	Kantor desa

Sumber : Data lapangan tahun 2010.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam empat (4) kali kegiatan rapat yang di adakan oleh kepala desa, tidak seluruh anggota BPD yang hadir. Di mana pada tanggal 12 november 2008 dari 9 orang anggota hanya 3 orang yang mengikuti rapat, tanggal 19 oktober 2009 dari 9 orang anggota hanya 2 orang yang hadir. tanggal 3 januari 2009 dari 9 orang anggota hanya 4 orang yang hadir. Tanggal 10 april 2009 dari 9 orang anggota hanya 5 orang yang hadir .

Fungsi politik BPD adalah menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat kepada eksekutif, mengolah dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam bentuk

keputusan (kebijakan) publik, mengawasi dengan seksama pelaksanaan tugas eksekutif.dari fungsi politik tersebut, maka berdasarkan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang – Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Bab XI pasal 209 mengesahkan fungsi – fungsi yang harus dijalankan BPD,yaitu :

1. Menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sebagaimana yang terdapat pada desa–desa lain, maka di Desa Banjar Seminai yang merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, juga memiliki BPD. Dilihat dari segi administrasi, lembaga ini selain strukturnya telah diisi berdasarkan petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan, juga penetapan tugas dimasing–masing telah dijelaskan

Sehubungan dengan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Banjar Seminai dengan mengangkat judul penelitian **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut ;**“Bagaimanakah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan dalam memajukan desa agar tidak mengalami ketertinggalan, khususnya dalam pembangunan.
2. Bagi pemerintah penelitian ini sangat bermanfaat untuk bahan acuan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengambil kebijakan untuk di terapkan ditengah – tengah kehidupan, terutama bagi pihak BPD di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, sehubungan dengan peranannya sebagai wakil aspirasi masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi yang sama pada masa yang akan datang.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : Telaah Pustaka

Isi dari bab ini terdiri dari Peranan, Pengawasan, Pembangunan Desa, Pemerintah Desa, Fungsi BPD, Definisi Konsep, Definisi Operasional dan Hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisikan Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, dan Analisis Data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian. Seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya

BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ilmiah untuk memperdalam suatu permasalahan maka fungsi kerangka teori sangat membantu dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat dengan demikian dalam memecahkan masalah tampak lebih jelas sesuai dengan teori itu sendiri maka penulis beranjak dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan kondisi organisasi di mana lembaga itu berada dari adanya teori-teori yang tepat yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian penulis.

II.1.1 Peranan

Berdasarkan referensi yang ada belum ada kesatuan persepsi tentang arti kata peranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan Menurut Soerjono Soekanto (2005 : 243) peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus di sebelah luar.

Menurut Miftah Thoha (1990 : 25) peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Dengan demikian suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu di dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat (Soejono Soekanto)

Peranan pemerintah desa dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai pemerintah desa.

Dari pengertian-pengertian di atas peranan dapat diartikan sebagai suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara bersikap berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam kolektif atau keadaan sosial tertentu.

II.1.2 .Pengawasan

Pengawasan dapat di artikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan– tujuan organisasi dan manajemen tercapai atau membuat suatu kegiatan sesuai dengan yang di rencanakan.

Menurut Terry (dalam Mukijat 2000:55) mengatakan pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, menilainya dan menerapkan tindakan-

tindakan perbaikan apabila diperlukan untuk menjamin hasil yang sesuai dengan rencana.

Menurut otonomi daerah UU No.32 Tahun 2004 pasal 218 pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di laksanakan oleh pemerintah yang meliputi :

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota maka pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan sepanjang bukan lintas kabupaten dan kota yang bersangkutan termasuk pengawasan terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa.

II.1.3 Pembangunan Desa

Desa menurut UU No.32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan dasar dalam mempertahankan kemerdekaan (community power).

Menurut (Muhadan Labolo, 2006 : 133) Desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti gotong royong, musyawarah mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan semboyan.

Lahirnya pelebagaan politik di tingkat lokal (desa) yang merupakan organisasi formal di harapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih Demokratis, Otonom, Independen, dan sekaligus Prospektif dalam pengembangan demokrasi di tingkat desa.

Komunitas desa merupakan bagian integral dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi. Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selain sebagai tempat tinggal masyarakatnya sekaligus sebagai wadah terselenggaranya kekuasaan yang merupakan berlangsungnya pemerintahan yang berdasarkan hak istimewanya yaitu adat istiadat yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Nilai-Nilai adat inilah yang menjadi landasan bagi Otonomi Daerah yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada dalam wilayah Kabupaten.

Adapun kewenangan desa yang terdapat dalam Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2004, Kewenangan desa mencakup:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan berlaku yang belum di laksanakan oleh daerah atau pemerintah .
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten.

Pembangunan dapat di cermati sebagai berikut: pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kehidupan, dan dapat pula

dikatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu kehidupan karena mutu kehidupan dapat di artikan sebagai derajat untuk memenuhi kebutuhan dasar (Soemarwoto, 1993:139).

Pembangunan adalah usaha atau suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang di lakukan oleh suatu bangsa dan negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Sondang.P.Siagian, 1990:2-3).

Pembangunan adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya (Haryono Sudriamunawar, 2002 : 15).

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang terus menerus di lakukan dan bertujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya yang wajar dan mengembangkan sehingga ia berhubungan serasi dan dinamik ke luar dan berkembang serasi, selaras, dan seimbang di dalam.(Taliz Duhu Ndraha : 2004 : 14).

Pembangunan juga dapat di artikan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap mereka sendiri.

Ini berarti bahwa dalam pembangunan terdapat beberapa persyaratan. Adapun persyaratan pembangunan yaitu :

1. Tujuan dari perubahan sosial dapat diakomoder oleh sistem nilai dan tradisi yang ada yang di anggap cukup memuaskan.
2. Tujuan pembangunan akan diterima masyarakat bila pembangunan tersebut dapat secara nyata memberikan keuntungan pada saat sekarang maupun pada saat mendatang.
3. Tujuan pembangunan akan lebih cepat diterima bila pembangunan tersebut di usulkan melalui orang-orang yang di hormati.
4. Tujuan pembangunan akan diterima bila hal itu secara menyeluruh sinkron dengan pola-pola kepribadian individu anggota masyarakat.
5. Tujuan pembangunan akan di terima bila dirasakan pembangunan tersebut mudah diterima melalui proses belajar yang ada.

Pelaksanaan pembangunan akan berhasil apabila persyaratan tersebut telah dapat terpenuhi. Hal ini tidak lepas dari peranan pemimpinnya.

Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka imbalan kewajiban yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarkat desa. Kewajiban pemerintahan adalah menyediakan prasarana-prasarana, bimbingan dan pengawasan didasarkan kepada keterangan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam pembangunan desa bahwa pembangunan fisik sangat erat kaitannya dengan tujuan diadakan pembangunan itu sendiri yakni perubahan taraf hidup dalam masyarakat desa khususnya secara ekonomi, dimana ketersediaanya

prasarana sebagai salah satu bagian penting dari proses produksi, konsumsi dan distribusi dalam sisi kehidupan ekonomi masyarakat desa.

Defenisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional Artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dengan segala aparat dan seluruh jajaran meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah desa cukup dominan.

II.1.4 Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa yang diakui masyarakat sebagai seorang pemimpin diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan atau pemerintah dalam satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama masyarakatnya untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbang nyata dalam pencapaian tujuan.

Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang terendah langsung di bawah Camat. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut ditegaskan merupakan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan Pemerintah Desa. Dengan penjelasan istilah BPD dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pembentukan Pemerintahan Desa dan BPD dilakukan oleh masyarakat desa. Dari prospektif politik BPD memiliki otoritas politik yang sangat kuat, otonom dan independen dalam menjalankan fungsinya, fungsi legislasi, dan pengawasan.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dan perangkat-perangkat desa. Sedangkan bentuk dan Susunan Pemerintahan Desa menurut keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999, Pasal 202 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa adalah:

1. Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Perubahan pengaturan tentang Pemerintah Daerah melalui undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa konsekuensi penting terhadap elemen dasar pemerintah, yaitu Pemerintahan Desa. Sekalipun tidak begitu signifikan perubahan yang di tampilkan oleh Undang-undang tersebut di banding Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, namun dapat dipahami bahwa pengaturan Pemerintahan Desa tampak mengalami perhatian serius oleh pemerintah pusat melalui perubahan format badan-badan pelaksana dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Pada bagian ini akan dibahas perubahan atas format Pemerintahan Desa menurut perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan mempersoalkan kembali relativitas Otonomi Desa secara normative dengan membandingkan dalam realitas penyelenggaraan.

Pertama, adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif Desa (Pemerintah Desa) dan Legislatif Desa (BPD). Dengan adanya pemisahan tersebut maka

kekuasaan mulai dibagi, dipisahkan serta dibatasi. Eksekutif Desa (Pemerintahan Desa) tidak lagi menjadi “pusat” dari proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan desa, namun hanya sebagai pelaksana kebijakan. Proses pembuatan kebijakan Desa dilakukan dengan melakukan pelibatan partisipasi masyarakat melalui saluran formal berupa Lembaga Legislatif Desa (BPD) dan sekaligus Lembaga Legislatif Desa (BPD) dapat digunakan masyarakat untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan kebijakan Desa yang dilakukan oleh Eksekutif Desa (Pemerintah Desa). Dengan adanya pemisahan kekuasaan antara Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa maka telah terjadi perubahan struktur Pemerintahan Desa yang tidak lagi bersifat sentralistik berganti dengan pengaturan Pemerintahan Desa secara demokratis melalui pemberian tempat bagi adanya partisipasi oleh warga desa.

Kedua, pengurangan mengenai sistem hirarki birokrasi. Jika pada masa orde baru Pemerintahan Desa hanya menjadi sub bagian dari kabupaten yang dapat dikontrol dan di intervensi melalui Kecamatan. Dengan adanya struktur Pemerintahan Desa yang baru, Kecamatan tidak lagi membawahi Desa, dan Desa langsung berhubungan dengan Kabupaten. Hubungan antara Desa dan Kabupaten yang kemudian diatur lebih dalam hubungan –hubungan yang bersifat formalistic. Hal tersebut misalnya tercermin dalam mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa yang lebih ditekankan untuk diberikan kepada masyarakat melalui lembaga BPD dan ketingkat kabupaten lebih bersifat pelaporan. Dengan adanya struktur yang demikian, maka jalannya pemerintahan desa lebih dikontrol oleh masyarakat desa sendiri dan bukan oleh pemerintah yang lebih atas. Dengan kata lain proses

yang terjadi di desa lebih ditekankan pada dinamika internal desa dibandingkan dengan instruksi dari hirarki pemerintah di atasnya.

Pemerintahan Desa yang di dalamnya termasuk Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan untuk pembuatan kebijakan dan Peraturan Desa yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Daerah di mana ia tinggal dan kebijakan ini akan ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sebagai salah satu institusi demokrasi desa dituntut untuk berperan melestarikan nilai-nilai demokrasi di Desa. Penciptaan hubungan mitra kerja antara BPD sebagai oposisi apalagi sebagai rekan kolusi Kepala Desa, akan tetapi ini merupakan wakil rakyat yang fungsi pokoknya adalah melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 pasal 14 tentang Desa menjelaskan tugas, fungsi, kewajiban dan hak Kepala Desa adalah :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat satu Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - f. Membina perekonomian desa
 - g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Desa mempunyai kewajiban
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Memelihara kesatuan dan ketertiban masyarakat
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
 - f. Menjalin hubungan dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa

- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa dengan baik
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa
 - m. Membina , mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa dan
 - o. Mengembangkan potensi Sumber Daya
 - p. Alam dan melestarikan lingkungan hidup
4. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban BPD, serta menginformasikan laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada masyarakat.
 5. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 6. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu dalam musyawarah BPD
 7. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahn desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau informasi secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

8. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan oleh Bupati/walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
9. Laporan masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat dan kepada BPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pemerintahan Desa dan BPD dapat membangun kerja sama untuk mendorong kemandirian dan kreativitas dalam mengelola Rumah Tangga Desa dengan pemanfaatan potensi yang ada, konsekuensi dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa dan BPD harus dapat menggali sumber daya yang tersedia bagi pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat di Desa.

II.1.5 Fungsi BPD

Menurut pasal 36 Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan desa, bahwa BPD mempunyai fungsi antara lain :

- a. Mengayomi menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup yang berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. Contohnya : Dengan mempertahankan keberadaan suku-suku yang ada dalam masyarakat serta mengikutsertakan kepala-kepala suku tersebut membuat keputusan dan peraturan untuk membangun desa, contohnya peraturan dalam suku yang tidak dilanggar adalah tidak bolehnya nikah satu suku. Seperti yang dirumuskan Oleh Azirin dalam Rauf dan Zulpan (2004 : 33), bahwa masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa dan Marga di Sumatra Selatan

adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdirisendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, dan penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar.

- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa. Contohnya : BPD ikut merumuskan rancangan peraturan desa tentang pendapatan asli desa (PAD) dan kekayaan desa dan juga BPD hendaknya ikut menetapkan anggaran pendapatan belanja (APB) desa. Menurut Arbi Sanit dalam Rauf dan Zulpan (2004 : 35), "Fungsi BPD yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan legislatif, atau badan pembuat undang-undang kepadanya. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal yang dihasilkan. Dalam waktu yang bersamaan, Parlemen berperan pula sebagai unsur pemerintah atau memberikan dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga pemerintahan selain itu dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang dikandung oleh pasal-pasal undang-undang yang sama.
- c. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang, yang dilakukan BPD secara terbuka dari masyarakat disampaikan ke kantor

BPD secara tertulis maupun lisan kemudian dibahas oleh anggota BPD. Menurut Alfred D.E Grazia dalam Rauf dan Zulfan (2004 : 40), bertolak dari teori tentang demokrasi, maka demokrasi mengajarkan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi didalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan. Dengan kata lain pemerintah melakukan apa yang di kehendaki oleh anggota masyarakat.

- d. Pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran pendapatan belanja desa serta keputusan kepala desa, BPD hendaknya ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa sesuai dengan peraturan desa melaui LPJ. LPJ dilakukan setiap akhir tahun dan juga di akhir masa jabatannya. Menurut Arbi Senit dalam Rauf dan Zulfan (2004:38). Sebagai pengawas maka lembaga ini data dan keterangan yang memadai bahan itu didapatinnya melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Dan berbagai bentuk pengawasan yang dapat di manfaatkan oleh lembaga ini adalah bertanya, interpelasi, angket dan mosi.

Dari keempat fungsi diatas dapat dijelaskan arti penting dari adat istiadat itu adalah sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang bumi putra dan orang turunan timur asing yang mempunyai pemaksa,sanksi atau norma-norma lagi pula tidak dikofikasikan. Menurut Taliziduhu Ndraha (1990 : 40) pembangunan masyarakat atau pembangunan komunitas adalah suatu proses baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang di ambil berdasarkan prakarsa sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi. Arti penting dari pembuatan peraturan dan pengambilan kebijakan

adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan nilai-nilai dalam tindakan-tindakan yang terarah.

Kemudian Edi Suharto, (2005 : 7) mengatakan pengambilan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Pada dasarnya fungsi pengawasan dapat dibagi dalam empat tahapan yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan
3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan
4. Pengabdian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar (Hani Handoko, 2000 : 26).

Menurut Alfian (1985 : 75) jika dicermati dengan seksama arti penting dari penyaluran aspirasi itu adalah untuk menyampaikan kehendak atau suatu keinginan yang keras untuk mendapatkan sesuatu yang lebih jelas lagi. Penyaluran aspirasi adalah untuk menyampaikan kehendak atau kemauan untuk maju. Dalam kompetisi di atas bahwa sebagai lembaga penyaluran aspirasi masyarakat BPD perlu mengadakan rapat atau dengar pendapat.

Dengan demikian peranan penyaluran aspirasi masyarakat tidak akan terlepas dari keterkaitannya dengan semua aspek yang terkait yaitu pemerintah desa dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam rangka memperoleh informasi

yang dijadikan pertimbangan atau alternatif kebijaksanaan. Terlaksananya peranan penyaluran aspirasi masyarakat dapat dilihat dari bagaimana hubungannya dengan aspek-aspek pemerintah desa disuatu pihak dan organisasi sosial kemasyarakatan di lain pihak.

Dipandang dari sudut kewajiban BPD maka ia dituntut lebih aktif dan dinamis dalam menjalankan serta merealisasikan tugasnya atau dengan kata lain BPD harus melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka mencari dan menggali apa yang menjadi aspirasi yang disalurkan supaya aspirasi masyarakat akan dapat disalurkan.

Dengan kata lain, konsekuensi BPD akan terlihat pada kesungguhan dan kegigihan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan desa yang dapat ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat desa.

II.2 Definisi Konsep

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian di antaranya adalah:

1. Peranan adalah tugas dan fungsi pemerintah desa untuk melakukan kewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang berfungsi:
 - Fungsi menjaga mengayomi adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

- Fungsi membuat Peraturan Desa, yaitu menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama-sama Pemerintah Desa.
 - Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu berusaha menampung dan menyalurkan setiap aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
 - Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang merupakan mengontrol penyelenggaraan Pemerintah Desa baik itu berupa perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan.
3. Desa adalah yang di sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional di Daerah Kabupaten.
 4. Pemerintahan Desa kegiatan pemerintahan yang di laksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.
 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 6. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan yang di laksanakan masyarakat Kecamatan Kampar khususnya desa Tanjung Rambutan untuk mengadakan perubahan kepada kondisi yang lebih baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan.

II.3 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut

Adapun Variabel dalam penelitian ini adalah Peranan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan indikator sebagai berikut :

1. Mengayomi

- a. Membina Lembaga Adat
- b. Mendukung keputusan-keputusan lembaga adat
- c. Memelihara dan melindungi

Dengan Pengukuran :

Sangat Berfungsi : Bila BPD ikut membina lembaga adat, mendukung dan mengawasi keputusan-keputusan lembaga adat serta ikut memelihara nilai-nilai adat dalam masyarakat dan dapat mengamalkan dalam masyarakat.

Berfungsi : Bila BPD ikut membina lembaga adat, mendukung keputusan – keputusan lembaga adat serta ikut memelihara nilai – nilai adat dalam masyarakat..

Cukup Berfungsi : Bila BPD tidak dapat menjalankan salah satu dari membina adat istiadat, mendukung keputusan – keputusan lembaga adat atau ikut memelihara nilai – nilai adat istiadat diDesa.

Tidak Berfungsi : Bila BPD tidak dapat melaksanakan kedua dari ketiga unsure : membina lembaga adat, mendukung keputusan adat atau memelihara nilai adat dalam masyarakat.

Sangat Tidak Berfungsi : Bila BPD tidak dapat melaksanakan sama sekali ketiga unsur : membina lembaga adat atau memelihara nilai adat dalam masyarakat.

2. legislasi :

- a. Merumuskan Peraturan Desa
- b. Menetapkan Peraturan Desa
- c. Membuat Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa

Dengan Pengukuran :

Sangat Berfungsi : Bila BPD dapat melaksanakan dan mengamalkan dari keseluruhan fungsi merancang, merumuskan dan dapat menetapkan atau ikut membagikan keputusan Desa ikut terlibat didalamnya.

Berfungsi : Bila BPD mulai dari merancang merumuskan dan sampai menetapkan atau membagikan keputusan desa ikut terlibat didalamnya.

Cukup Berfungsi : Bila BPD tidak ikut dalam salah satu dari merancang dan merumuskan atau menetapkan keputusan – keputusan desa.

Tidak Berfungsi : Bila BPD tidak dapat terlibat dari dua fungsi dalam tiga unsur seperti merancang, merumuskan dan menetapkan keputusan-keputusan Desa.

Sangat Tidak Berfungsi : Bila BPD tidak terlibat sama sekali dalam hak merancang, merumuskan keputusan desa.

3. Pengawasan

- a. Pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa
- b. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa
- c. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa

Dengan Pengukuran :

Sangat Berfungsi : Bila BPD dapat benar-benar menjalankan ketiga fungsi dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan di Desa .

Berfungsi : Bila BPD dapat menjalankan ketiga fungsi dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan di desa.

Cukup Berfungsi : Bila BPD hanya dapat melaksanakan satu dari tiga, melaksanakan pengawasan terhadap keputusan desa atau melaksanakan pengawasan terhadap keputusan kepala desa.

Tidak Berfungsi : Bila BPD hanya dapat melaksanakan dua dari tiga fungsi melaksanakan pengawasan terhadap keputusan Desa atau melaksanakan pengawasan terhadap keputusan Desa .

Sangat Tidak Berfungsi : Bila BPD tidak terlibat sama sekali dalam melaksanakan pengawasan terhadap keputusan – keputusan desa dan kepala Desa..

4. menyampaikan aspirasi:

- a. Menerima aspirasi dari masyarakat
- b. Merumuskan aspirasi yang telah diterima
- c. Menyalurkan aspirasi kepada instansi yang berwenang

Dengan Pengukuran :

Sangat Berfungsi : Bila BPD dapat benar-benar menjalankan mulai dari menerima merumuskan sampai menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berfungsi : Bila BPD dapat mulai dari menerima merumuskan sampai menyalurkan aspirasi masyarakat.

Cukup Berfungsi : Bila BPD hanya dapat melaksanakan satu dari tiga, menerima, merumuskan atau menyalurkan saja aspirasi masyarakat .

Tidak Berfungsi :Bila BPD tidak dapat menjalankan dua dari ketiga kegiatan menerima, merumuskan atau menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sangat Tidak Berfungsi : Bila BPD tidak dapat menjalankan ketiga kegiatan menerima, merumuskan atau menyalurkan aspirasi masyarakat.

II.4 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah maka, penulis mengambil hipotesa yaitu :

“Diduga bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak belum optimal”.

Disebabkan karena :

- A. Kurangnya dana, sarana dan prasarana yang menyebabkan keterbatasan untuk bergerak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- B. Kurangnya koordinasi.
- C. Kurangnya partisipasi masyarakat.

Teryata dugaan saya salah” karena pada umumnya responden menilai bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dalam pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang di laksanakan pada umumnya sudah cukup sesuai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan lama penelitian kurang lebih dua bulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, yaitu berupa informasi dan dari wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari studi kepustakaan maup teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat menunjang aspek yang di teliti mengenai Demografi Desa Banjar Seminai.

3.3 Teknik Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung langsung terhadap objek yang di teliti, dengan melihat kondisi yang ada.
- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang utama. Jenis wawancara yang di lakukan bersifat tidak terstruktur, wawancara di lakukan secara mendalam terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian yang telah dipilih sebelumnya, yakni dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat setempat.

- c. Angket yaitu Menyebarkan daftar pertanyaan tertulis sebagai data primer yang akan diolah untuk membantu pemecahan masalah dalam penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiono, 2005 : 90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 9 orang dan penduduk Desa banjar semaini berjumlah 2463 orang data tahun 2009, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Karena populasi besar maka penulis mengambil sampel sebesar 44 orang dengan menggunakan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

e: nilai kritis (batas ketelitian) yang di inginkan.

Dimana tingkat kesalahan yang diambil sebesar 15 % dengan jumlah masyarakat sebesar 2463 orang, maka didapatkan sampel sebesar :

$$n = \frac{2463}{1+2463(0,15)^2}$$

$$n = \frac{2463}{56.41}$$

$$n = 44$$

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1: Jumlah Populasi dan Sampel di Desa Banjar Seminai

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua BPD	1	1	100%
2	Wakil BPD	1	1	100%
3	Anggota BPD	7	7	100%
4	Masyarakat	2463	44	15%
	Jumlah	2472	53	

Sumber: Kantor Desa Banjar seminai Kec. Dayun Kab. Siak

3.5 Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penganalisaan secara deskriptif. Analisa deskriptif diawali dengan pemaparan tentang informasi dan fakta yang ada di lapangan. Kemudian di analisis dengan pemaparan dalam bentuk informasi dan angka-angka yang disertai dengan uraian-uraian atau penjelasan. Dengan analisa deskriptif di harapkan penelitian ini mampu menjelaskan fakta empirik yang ada secara mendalam.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

IV.1. Keadaan Geografis

Desa Banjar Seminai merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Adapun yang menjadi batas-batas di Desa Banjar Seminai adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Suka Jaya.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Banjar Tengah.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Inti Dua

Desa Banjar Seminai mempunyai dusun sebanyak 3 dan satu kelurahan dengan luas 7,01 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 2463 jiwa. Pola tata desanya dipengaruhi oleh keadaan geografis yang merupakan daerah dataran tinggi, yaitu pola perkampungan yang berkelompok dan menyebar memanjang mengikuti jalan raya. Keadaan iklim di Desa Banjar Seminai adalah beriklim sub-tropis, dimana terdapat dua musim dalam satu tahun yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan suhu rata-rata 30°C - 34 °C

Adapun keadaan desa sample yaitu Desa Banjar Seminai di sebelah selatan yang berbatasan dengan Dusun Banjar Tengah dengan jarak 1 km dari Desa Banjar Seminai. Dari sini dapat diketahui Desa yang dijadikan sample adalah desa Desa Banjar Seminai itu sendiri yang berada diujung Desa dan berbatasan langsung dengan Desa tetangga. Untuk lebih jelasnya tentang luas

wilayah Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.I : Luas Wilayah Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

No	Desa/Kelurahan	Luas wilayah (Km ²)
1	Desa banjar seminai	7, 01Km ²
	Jumlah	7,01 Km ²

Sumber Data : Kantor Kepala Desa 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa luas Desa Banjar Seminai adalah 7,01 Km² yang terdiri dari 3 dusun dan 1 kelurahan. Keadaan tanah atau topografi sebagian besar terdiri dari dataran rendah karena terdapat perkebunan kelapa sawit dengan kondisi tanah (fisiografi) pada lapisan atas berwarna hitam dan lapisan bawah berwarna kuning.

IV.2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk dari Desa Sampel yaitu Desa Banjar Seminai adalah 2463 jiwa. Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak daerah yang penduduk relative padat dengan luas 7,01 km². Sebagai penduduk terpadat nomor 2 di beberapa desa yang ada Kecamatan Dayun. Kemudian sebagian besar penduduk tinggal di perumahan perkebunan kelapa sawit. Untuk mengetahui jumlah penduduk dusun di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun
Kabupaten Siak.**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah (Jiwa)
1	Banjar Seminai	2463
	Jumlah	2463

Sumber Data : Kantor Kepala Desa 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Desa Banjar Seminai adalah 2463 jiwa. Dimana antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relative seimbang. Jumlah penduduk laki-laki adalah 1289 dan jumlah penduduk perempuan adalah 1173 jiwa. Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk di Rinci Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa
Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Banjar Seminai	1289	1173
	Jumlah	1289	1173

Sumber Data : Kantor Kepala Desa 2010

1. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah tersebut.

Karena pendidikan merupakan bagian terpenting bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan SDM. Pendidikan perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada di wilayah Desa Banjar Seminai mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SLTA telah ada. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan yang ada di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.6. Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Kabupaten Siak

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	PAUD	3	—	3
2	TK	3	—	3
3	SD	2	—	2
4	SLTP	2	—	2
Jumlah		10	—	10

Sumber Data : Desa Banjar Seminai Tahun 2010.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana dan pendidikan yang paling banyak adalah gedung sekolah dasar (SD). Berikut adalah prasarana gedung Sekolah Lanjut Pertama (SLTP), gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan gedung sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)

2. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencarian merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mata pencarian penduduk Desa Banjar Seminai beraneka ragam, dan sebagian besar penduduk desa ini hidup bertani dan berkebun. Selain itu ada juga Berdagang, Buruh, Guru, PNS, Berternak dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu masyarakat juga bekerja sebagai petani sawit dari kebun mereka sendiri, namun sebagian kecil masyarakat desa banjar seminai dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya masih ada yang mengandalkan menjadi buruh petani sawit, dan buruh bangunan.

3. Kehidupan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di negara Republik Indonesia di jamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Sesuai dengan falsafah Negara maka peranan kehidupan beragama senantiasa dikembangkan di tingkatkan untuk makna kehidupan masyarakat di tengah - tengah esistensinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa.

Mayoritas masyarakat Desa Banjar Seminai adalah beragama islam yaitu 99% kemudian Kristen 1%. Adapun masyarakat yang beragama Kristen ini adalah pendatang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.4. Jumlah Penduduk di Desa Banjar Seminai Menurut Jenis Agama Yang di Anut

No	Agama	Jumlah	persentase
1	Islam	2420	98,25
2	Kristen	43	1,75
	Jumlah	2463	100 %

Sumber Data : Desa Banjar Seminai Tahun 2010.

Untuk menunjang rutinitas peribadatan di Desa Banjar Seminai perlu kiranya dibangun tempat beribadah. Adapun jumlah sarana ibadah di Desa Banjar Seminai dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.5. Jumlah Tempat Ibadah di Desa Banjar Seminai Kecamatan Kabupaten Siak

N0	Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	4	25
2	Mushala/ Surau	10	62,5
3	Gereja	2	12,5
	Jumlah	16	100%

Sumber Data : Desa Banjar Seminai Tahun 2010.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat Masjid, Mushala atau surau. Sedangkan tempat ibadah untuk agama Kristen, budha dan hindu yaitu seperti gereja, wiara, klenteng tidak ada. Hal ini dapat di maklumi karena jumlah pemeluknya sangat sedikit.

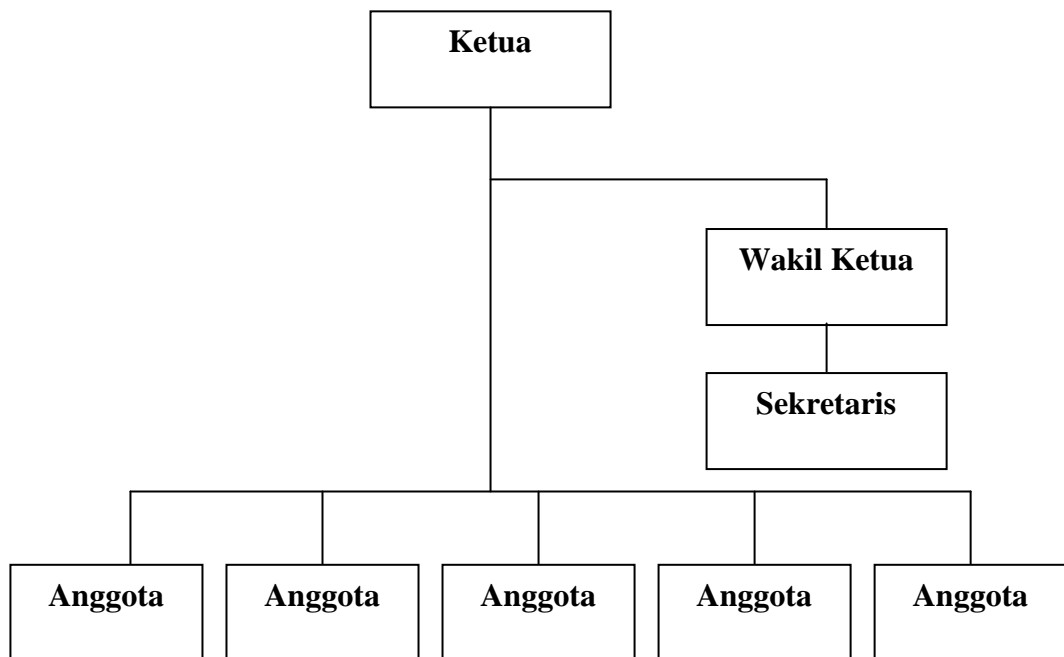
IV.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Banjar Seminai

1. Struktur Organisasi BPD Desa Banjar Seminai

Pelaksanaan fungsi BPD terletak pada daya dukung anggota didalamnya atau mekanisme yang ada sehingga dengan itu sejumlah alat kelengkapan telah di

adakan dalam struktur organisasi badan yang didasari oleh perda No. 9 Tahun 2007 yaitu pimpinan BPD, sekretaris atau anggota-anggota, yang selanjutnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

Gambar IV. 1
Struktur Pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Banjar Seminai



Sumber : Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2008

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banjar Seminai yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Organisasi Profesi berjumlah sembilan (9) orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel IV.7 : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Di Desa Banjar Seminai

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur
1	SARYONO	Ketua	SMP	40
2	BUDIMAN.SP	Wakil	S1	38

		Ketua		
3	SUGIYONO	Sekretaris 1	SMA	41
4	ANTON MUHNASRUN	Anggota	SMP	55
5	SUYADI	Anggota	SMP	45
6	YULISMAN	Anggota	SD	47
7	SILVIA	Anggota	SMA	33
8	HADI PRAYETNO	Anggota	SD	55
9	WINTOLO	Anggota	SD	47

Sumber ; Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banjar Seminai, 2008.

2. Tata Kerja BPD Desa Banjar Seminai

a. Pimpinan BPD

Pimpinan BPD berbeda dengan kedudukan kepala desa dan beberapa organisasi lainnya maka pimpinan BPD menurut UU No.32 Tahun 2007 adalah dipilih oleh dan dari anggota BPD itu sendiri dan disahkan oleh Bupati, perlu diketahui pembagian tugas pimpinan BPD ditetapkan dalam keputusan pimpinan BPD, adapun tugas dan kewajiban pimpinan BPD adalah :

1. Membantu panitia pemilihan kepala desa
2. Menetapkan calon terpilih kepala desa
3. Memberi persetujuan atas terpilihnya atau pengangkatan perangkat desa

4. Memberikan pertimbangan terhadap pembentukna penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan
5. Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan desa
6. Menerima atau menolak pertanggungjawaban yang di berikan kepala desa
7. Bersama dengan kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa)
8. Memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhir masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
9. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap perjanjian dengan pihak ketiga.
10. Menampung pendapat pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap perjanjian dengan pihak ketiga.

Pimpinan BPD ini sebanyak-banyaknya 2 orang yang terdiri dari seorang ketua dan 1 orang wakil ketua, tetapi sebelum BPD memiliki ketua dan wakil ketua, maka rapat sementara dipimpin oleh anggota yang tertua usianya.

b. Sekretaris BPD

Sekretaris BPD sebagai alat perlengkapan BPD dibentuk dengan perda daerah itu sendiri. Sekretaris BPD sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal 27 perda kabupaten Siak dipimpin oleh seorang sekretaris BPD dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan, yang di angkat oleh pemerintah desa atas

persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari perangkat desa, sekretaris BPD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan BPD dan dalam melaksanakan tugasnya dan kewenangan pimpinan BPD dibantu oleh sekretaris BPD.

Untuk mengembangkan otonomi dan perwujudan demokrasi pancasila di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa dan juga anggota BPD dipilih dari penduduk desa dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat , pemuka masyarakat dan agama yang memenuhi persyaratan. Dalam strukturisasi keorganisasian BPD dibantu pula anggota merupakan alat perlengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada permulaan pelaksanaan tingkatnya.

Secara umum tugas dan kewajiban anggota BPD adalah :

1. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi atau Membantu sekretaris sesuai kebutuhan yang diangkat oleh pemerintah desa atas persetujuan pimpinan BPD dan berada pertanggungjawaban kepala pimpinan BPD.
2. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.
4. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
6. disampaikan kepada pejabat dan instansi berwenang untuk tindak lanjut penyelesaian.
7. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat desa.

c. Anggota BPD

Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD dibentuk panitia pemilihan oleh pemerintah desa bersama-sama pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan yang dilakukan melalui musyawarah atau mupakat dan ditetapkan dengan keputusan menteri.

- 1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam keanggotaannya terdiri dari :
 - a) Tokoh adat
 - b) Tokoh agama
 - c) Tokoh masyarakat
- 2) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud adalah :
 - a) Ketua merangkap anggota
 - b) Wakil ketua merangkap anggota
 - c) Sekretaris merangkap anggota
 - d) Bendahara merangkap anggota
 - e) Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
- 3) Panitia pemilihan ini mempunyai tugas :
 - a) Menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD
 - b) Melakukan pendaftaran bakal calon anggota
 - c) Melaksanakan pendaftaran pemilihan dan pengarahannya sementara maupun daftar tetap pemilihan
 - d) Menetapkan nama-nama calon anggota BPD yang berhak dipilih

- e) Menetapkan besarnya biaya pemilihan
- f) Melaksanakan pemilihan calon anggota BPD
- g) Membuat berita acara pemilihan calon anggota BPD dan melaporkan kepada Bupati untuk mendaftarkan pengesahan.

Panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi desa yang bersangkutan tentang kekosongan keanggotaan BPD dan bakal calon anggota BPD diajukan oleh kalangan adat, agama dan tokoh masyarakat kepada panitia pemilihan.

Pelaksanaan kerja sampai saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten SIAK No. 08 Tahun 2006, tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana Pasal 17 yang dimaksud BPD adalah :

1. Sebagai Badan yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
2. Sebagai Badan yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pemisahan antara kekuasaan Pemerintah Desa dan BPD ini membawa implikasi yang luas, yakni kekuasaan mulai dibagi, dipisahkan dan dibatasi. Pemerintah Desa tidak menjadi pusat dari kebijakan melainkan hanya sebagai pelaksana kebijakan yang harus senantiasa bersedia untuk dikontrol oleh BPD.

Tahap-tahap perumusan BPD melalui bidang terhadap penyusunan perencanaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di desa Banjar Seminai sebagai berikut :

1. Melakukan rancangan terhadap Peraturan Desa yang termasuk tugas bidang masing-masing.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa serta peraturan perundangan lain. Kepala Desa, Pelaksanaan APB Desa, Kebijakan Pemerintah Desa serta pelaksanaan kerja sama desa.
3. Membantu ketua BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang di sampaikan Kepala Desa kepada BPD dengan jalan musyawarah.
4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa melalui ketua BPD terhadap rencana perjanjian kerja sama menyangkut kepentingan Desa mengenai usaha masyarakat dalam bidang perkebunan dan perikanan.
5. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
6. Mengadakan pinjaman dan kunjungan yang di anggap perlu oleh bidang yang bersangkutan atas persetujuan ketua BPD.
7. Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Desa, lembaga/ badan dan organisasi kemasyarakatan.
8. Mengajukan usul dan saran kepada Ketua BPD yang termasuk dalam ruang lingkup masing-masing bidang.
9. Memberikan laporan kepada Ketua BPD tentang hasil pekerjaan bidang dalam mengawasi kinerja Pemerintahan.

3. Peranan dan Fungsi BPD

Adapun peranan dan fungsi BPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 08 Tahun 2006 Pasal 18 adalah:

- a. Legislasi yaitu menyusun, menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa.
- c. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang sudah di terima dari masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang.
- d. Mengayomi menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup yang berkembang didesa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

Sementara itu, syarat-syarat dari keanggotaan BPD terdapat dalam pasal 12 No. 08 Tahun 2006, tentang pembentukan BPD. Yaitu :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945,
- c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati UUD 1945,
- d. Sehat jasmani dan rohani,
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun,
- f. Berkelakuan baik, jujur dan adil,
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana,

- h. Tidak cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang merupakan kekuatan hukum yang tetap,
- i. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta berdomisili di desa setempat.
- j. Bersedia dicalonkan menjadi peserta musyawarah.

Mekanisme penetapan calon anggota BPD menurut PERDA Pasal 10 sebagai berikut :

1. Anggota BPD dipilih oleh penduduk desa dari calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat dan sesuai dengan penduduk desa,
2. Calon anggota BPD dinyatakan dipilih adalah calon yang mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat desa yang bersangkutan.

Setelah pengesahan hasil anggota BPD Pasal 6 dilakukan melalui :

1. Anggota BPD yang telah terpilih dan ditetapkan jumlahnya sebagaimana dalam Pasal 3, kemudian anggota BPD memilih pimpinan BPD dan disahkan oleh Bupati SIAK.
2. Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua,
3. Wakil ketua sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya dua orang sesuai dengan jumlah BPD,
4. Pimpinan BPD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diakan secara khusus,

5. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya di pimpin anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Untuk itu, tugas dan wewenang BPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 08 Tahun 2006, tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 7 adalah :

- a. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa,
- b. Menetapkan calon terpilih Kepala Desa melalui keputusan BPD berdasarkan laporan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan calon kepala desa,
- c. Menyetujui dan menetapkan proses pembentukan, penghapusan atau pengaturan desa,
- d. Menetapkan kebijakan proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- e. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- f. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa,
- g. Badan Permusyawaratan Desa memberitaukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatannya,
- h. Badan Permusyawaratan Desa menerima atau menlak pertanggung jawaban Kepala Desa atas nama rakyat desa.

Hak Badan Permusyawaratan Desa yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 3 Perda No. 8 Tahun 2006, tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, Kabupaten Siak, adapun hak dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

- a. Menerima uang gaji sesuai dengan kemampuan keuangan desa,
- b. Uang siring anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pemberhentian anggota dan pimpinan menurut Pasal 19 Perda Kabupaten Siak No. 8 Tahun 2006, tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

1. Anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana dapat diusulkan oleh masyarakat untuk di berhenti,
2. Pemberhentian sementara dilakukan dengan keputusan Bupati Siak ,
3. Selama anggota atau pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dikenakan pemberhentian sementara maka kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan oleh anggota yang lain atau wakil Badan Permusyawaratan Desa untuk pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Atas usul dan saran dari Kepala Desa dengan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat, maka Bupati Siak mencabut keputusan pemberhentian sementara anggota

atau pimpinan Dewan Permusyawaratan Desa untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan sah.

Menurut Pasal 23 anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pimpinan Dewan Permusyawaratan Desa di berhentikan oleh Bupati karena

- a. Meninggal Dunia,
- b. Atas permintaan sendiri,
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik anggota yang baru,
- d. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa,
- e. Sebab-sebab lain yang bertentngn denganketentuan peraturan Perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat desa itu.

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

A. Kedudukan

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kedudukan :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
2. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa.

B. Tugas dan Wewenang

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan wewenang :

1. Mengajukan calon kepala desa terpilih kepala Bupati untuk mendapat pengesahan

2. Megusul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
3. Bersama dengan Kepala Desa membuat Peraturan desa.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan lainnya
 - b. Pelaksanaan keputusan Kepala Desa
 - c. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
 - d. Kebijaksanaan Pemerintah Desa
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana perjanjian kerja sama menyangkut kepentingan desa.
5. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa

C. Fungsi

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi mengayomi adat-istiadat, menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, melakukan pengawasan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menurut perda.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Identitas Responden

Untuk menunjang keobjektifan dan akuratnya data dalam penelitian sehubungan dengan fungsi BPD, maka perlu disajikan identitas responden dari unsur anggota BPD dan masyarakat yang menyangkut tingkat pendidikan, tingkat umur, jenis kelamin dan jenis pekerjaan sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman respondennya.

V.1.1 Tingkat Pendidikan

Secara umum telah di ketahui bahwa pendidikan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas hidup dan kehidupan manusia, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan yang tinggi karena sudah kodratnya manusia menginginkan kualitas terbaik dari setiap pelaksanaan kegiatan atau tugasnya.

Implikasinya sangat jelas, kebutuhan akan pendidikan terus meningkat seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman, sehingga tanpa pendidikan yang layak seorang individu akan tertinggal. Demikian juga halnya dengan anggota BPD Desa Banjar Seminai yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Di Desa tersebut pendidikan juga menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dan memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Untuk lebih jelasnya pendidikan anggota BPD dan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel V.1 : Tingkat Pendidikan Responden Anggota BPD

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	3	33,33%
2	SMP	3	33,33%
3	SMA	2	22,22%
4	Sarjana	1	11,11%
	Jumlah	9	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini yang tamat SD sebanyak 3 orang atau 33,33%, yang tamat SMP sebanyak 3 orang atau 33,33%, dan responden yang tamat SLTA terdiri dari 2 orang atau 22,22%, sedangkan yang menamatkan Sarjana terdiri dari 1 orang atau 11,11%.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden penelitian dari masyarakat di Desa Banjar Seminai, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 : Tingkat Pendidikan Responden Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamatan SD	12	27,27%
2	SMP	9	20,45%
3	SMA	13	29,54%
4	Diploma	4	9,09%
5	Sarjana	6	13,63%
	Jumlah	44	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat diketahui bahwa yang dijadikan responden dalam penelitian ini yang tamat SD terdiri dari 12 orang atau (27,27%), yang tamatan SMP terdiri dari 9 orang atau (20,45%), kemudian yang tamatan SMA terdiri dari 13 orang atau (29,54%), sedangkan yang tamatan Diploma terdiri dari 4 orang atau (9,09%), dan yang menamatkan Sarjana terdiri dari 6 orang atau (13,63%).

V.1.2 Jenis Kelamin

Responden penelitian ini terdiri dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah responden datinjaw dari jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel V.3 dibawah ini:

Tabel. V.3 : Jenis Kelamin Responden Anggota BPD

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	8	88,88%
2	Perempuan	1	11,11%
Jumlah		9	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.3 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan yakni 8 orang atau 88,88% dan 1 orang perempuan atau 11,11%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudah ada keterwakilan perempuan dalam anggota BPD.

Tabel. V.4 : Jenis Kelamin Responden Masyarakat

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	25	56,81 %
2	Perempuan	19	43,18%
Jumlah		44	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.4 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan yakni 25 orang atau 56,81% dan 19 orang perempuan atau 43,18%.

V.1.3 Umur Responden

Tingkat usia/umur responden berbeda-beda dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel. V.5 : Tingkat Usia Responden Anggota BPD

NO	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	15-25 Tahun	-	-
2	26-36 Tahun	-	-
3	37-47 Tahun	7	77,77%
4	>55 Tahun	2	22,22%
Jumlah		9	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Berdasarkan tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa tingkat usia responden BPD mulai dari 37-47 Tahun terdiri dari 7 orang atau 77,77% sedangkan yang diatas 55 Tahun sebanyak 2 orang atau 22,22%.

Tabel. V.6 : Tingkat Usia Responden Masyarakat

NO	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	15-25 Tahun	9	20,45%
2	26-36 Tahun	12	27,27%
3	37-47 Tahun	15	34,09%
4	>55 Tahun	8	18,18%
Jumlah		44	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Berdasarkan tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa tingkat usia responden Masyarakat mulai dari 15-25 Tahun terdiri dari 9 orang atau 20,45%, untuk kelompok

usia yang kedua 26-36 Tahun sebanyak 12 orang atau 27,27%, selanjutnya kelompok usia yang ketiga mulai 37-47 Tahun sebanyak 15 orang atau 34,09% sedangkan yang diatas 55 Tahun sebanyak 8 orang atau 18,18%.

V.1.4 Jenis Pekerjaan Responden

Untuk mengetahui jenis pekerjaan responden dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. V.7 : Jenis Pekerjaan Responden Anggota BPD

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	8	88,88%
2	Buruh	-	-
3	Pedagang	-	-
4	PNS	1	11,11%
5	Lain-lain	-	-
Jumlah		9	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Berdasarkan tabel V.7 diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden anggota BPD bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 8 orang atau 88,88% dan hanya 1 orang anggota BPD saja sebagai PNS atau 11,11%.

Tabel V.8 Jenis Pekerjaan Responden Masyarakat

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	12	27,27%
2	Buruh	6	13,63%
3	Pedagang	8	18,18%
4	PNS	10	22,72%
5	Lain-lain	8	18,18%
Jumlah		44	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden Masyarakat bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 12 orang atau 27,27%, untuk buruh sebanyak 6 orang atau 13,63%, untuk yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 8 orang atau 18,18%, untuk PNS sebanyak 10 orang atau 22,72% dan lain-lain sebanyak 8 orang atau 18,18%.

V.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun kabupaten Siak.

Salah satu fungsi BPD yang teridentifikasi sebagai lembaga legislatif desa adalah fungsi aspiratif yang selalu melekat pada diri mereka, yang ekstensinya tidak akan terlepas dari menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkembang di masyarakat. Sehingga mampu tidaknya BPD dalam melaksanakan tugas, fungsi maupun peranannya akan terlihat pada usahanya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat tertentu.

Dengan demikian, keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat akan berimplikasi pada keberhasilan BPD menjalankan fungsi aspiratifnya. Karena fungsi itu sendiri merupakan bagian dari tugas utama yang harus dijalankan. Oleh karena itu, untuk melihat pelaksanaan fungsi BPD dalam melaksanakan pembangunan pada uraian berikut dapat dijelaskan lebih lengkap:

V.2.1 Mengayomi Adat Istiadat

Adat-istiadat adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat desa, karena keduanya saling menguntungkan. Dalam kehidupan masyarakat Banjar Seminai, adat merupakan suatu nilai yang sampai saat ini masih dipertahankan dalam kehidupan kemasyarakatan.

Terpeliharanya nilai-nilai adat dalam masyarakat akan membantu pemerintahan desa menyelenggarakan pemerintahan., karena adat sebagai suatu nilai lebih dijalankan dengan baik akan menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dari sisi kehidupan demokrasi, adat-istiadat juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat desa, dimana Marbun dalam Rauf dan Zulfan (2004 :33-34), bahwa sampai saat ini sistem kekeluargaan masih berurat akar di seluruh sudut Negara Republik Indonesia, bahkan mereka yang kemudian pindah dan bertempat tinggal dikota besar atau kecil tetap dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan mempraktekannya seperti dalam bentuk arisan, persatuan marga, persatuan kekeluargaan berdasarkan asal-usul dan lain-lain.

Dan berbagai karya ilmiah tentang hukum adat dan sistem kehidupan marga, desa, nagari membuktikan bahwa dalam praktek kepemimpinan dan kekeluargaan tersebut berlaku demokrasi. Hal ini terbukti dalam kemampuan rakyat dalam

menentukan pemerintahan, untuk kemudian setia kepada pemerintahan secara turun-temurun.

Lebih lanjut lagi disebutkan bahwa, kekuasaan tertinggi dilingkungan masyarakat adat umumnya terletak pada rapat adat, yang dapat ditafsirkan sebagai dewan perwakilan rakyat dalam pengertian sekarang ini. Keanggotaan rapat adat ini terdapat kepala kesatuan adat (kepala marga , kepala desa) bersama anggota masyarakat yang memenuhi syarat kemampuan (cukup umur, keturunan atau pemilik tanah para tetua) dan bersifat terbuka dan segala keputusan dalam rapat adat diambil menurut suatu sistem terbuka yang disebut musyawarah dan mufakat.

Karena adat dianggap salah satu bentuk asli dari budaya desa, maka peranan pemerintahan desa dalam hal ini BPD sangat menentukan, dikatakan menentukan BPD merupakan representatif dari masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam pemerintahan desa. Bila BPD tidak memperhatikan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan pemerintahan desa baik kepala desa dan perangkat desa maupun BPD sebagai lembaga legislasi tidak akan berhasil maksimal.

Sehubungan dengan itu untuk mengetahui sejauh mana BPD sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat-istiadat di Desa Banjar Seminai dapat dilihat tanggapannya melalui tabel berikut:

Tabel V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden BPD Tentang Fungsi BPD Dalam Mengayomi Adat-istiadat.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Lembaga Adat berfungsi dengan semestinya	-	4	5	-	-	9
		-	44,44%	55,55%	-	-	100%
2	Anggota BPD ikut membina lembaga adat	1	5	3	-	-	9
		11,11%	55,55%	33,33%	-	-	100%
3	Anggota BPD ikut dalam mengambil keputusan adat	-	4	4	-	1	9
		-	44,44%	44,44%	-	11,11%	100%
4	Keputusan adat dipakai dan dipatuhi oleh masyarakat	-	3	5	1	-	9
		-	33,33%	55,55%	11,11%	-	100%
5	Anggota BPD mendukung dan ikut memenuhi keputusan adat	2	5	1	-	1	9
		22,22%	55,55%	11,11%	-	11,11%	100%
6	Total	3	21	18	1	2	45
		6,66%	46,66%	40%	2,22%	4,44%	100%
7	Rata-Rata	0,6	4,2	3,6	0,2	0,4	9
		6,66%	46,66%	40%	2,22%	4,44%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Keterangan:

SS : Sangat setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan sub indikator yang kelima dari tabel V.9 di atas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 46,66% menilai seluruh fungsi BPD dalam mengayomi adat-istiadat berada pada kategori setuju, namun masih ada

responden yang tidak setuju yaitu 2,22%, bahkan ada juga responden yang sangat tidak setuju sama sekali yaitu 4.44%.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam mengayomi adat-istiadat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.9 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 46,66% sudah setuju terhadap pelaksanaan fungsi BPD dalam mengayomi adat-istiadat di Desa Banjar Seminai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota BPD Ibu Silvia mengatakan bahwa sebagai anggota BPD telah ikut menjalankan fungsi BPD dalam mengayomi adat-istiadat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anggota BPD telah berperan dalam menjalankan salah satu fungsinya hal ini terbukti dengan mendukung dan telah ikut memenuhi adanya keputusan adat-istiadat.

Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden (masyarakat) terhadap fungsi BPD dalam mengayomi Adat-istiadat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.10 berikut:

Tabel V.10: Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Fungsi BPD Dalam Mengayomi Adat-istiadat.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Memiliki Lembaga Adat	15	25	3	1	-	44
		34,09%	56,81%	6,81%	2,27%	-	100%
2	Lembaga adat yang berfungsi dengan semestinya	2	17	22	3	-	44
		4,54%	38,63%	50%	6,81%	-	100%
3	Anggota BPD ikut membina lembaga adat	1	17	21	5	-	44
		2,27%	38,63%	47,72%	11,36%	-	100%
4	Keputusan adat dipakai dan dipatuhi oleh masyarakat	4	22	12	3	3	44
		9,09%	50%	27,27%	6,81%	6,81%	100%
5	Nilai-nilai adat dipelihara dan dilestarikan	-	16	25	3	-	44
		-	36,36%	56,81%	6,81%	-	100%
6	Total	22	97	83	15	3	220
		10%	44,09%	37,72%	6,81%	1,36%	100%
7	Rata-Rata	4,4	19,4	16,6	3	0,6	44
		10%	44,09%	37,72%	6,81%	1,36%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2009.*

Dari tabel V.10 di atas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 44,09% menilai fungsi BPD dalam mengayomi adat-istiadat pada kategori setuju, namun masih ada responden yang tidak setuju yaitu 6.81%, bahkan ada juga responden yang sangat tidak setuju sama sekali yaitu 1,36%.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam mengayomi adat-istiadat Desa Banjar Seminai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.10 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 44,09% sudah

setuju terhadap pelaksanaan fungsi BPD dalam mengayomi adat-istiadat Desa Banjar Seminai.

Berdasarkan uraian di atas dapat di bandingkan bahwa fungsi BPD dalam mengayomi adat-istiadat telah berjalan dengan baik, karena tanggapan responden PBD dan responden masyarakat telah mengatakan setuju dengan fungsi BPD dalam mengayomi adat-istiadat. Hal ini didukung dengan adanya adat-istiadat desa, adanya kepala adat yaitu orang yang dituakan atau kepala suku, adanya aturan-aturan adat-istiadat yang di patuhi oleh masyarakat, misalnya,adanya larangan untuk menikah satu atap dan lain-lain.

Dalam fungsi mengayomi ini mempunyai peran penting dalam pembangunan karena adanya suku-suku yang ada dalam masyarakat serta mengikut sertakan kepala-kepala suku tersebut dalam keputusan dan aturan-aturan untuk membangun Desa.dalam mengayomi ini mempunyai arti penting yaitu dalam gotong-royong ,tolong-menolong,hal ini dapat memacu pembangunan Desa Banjar Seminai.

V.2.2 Legislasi

Fungsi legislasi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa atau di sebut juga Fungsi legislasi yakni merumuskan dan menetapkan peraturan desa menurut pasal 48 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1999, bahwa : ayat (1) rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa atau BPD, ayat (2) kepala desa menetapkan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Dengan demikian, fungsi BPD hampir sama dengan DPRD untuk tingkat Kabupaten dan Provinsi yang berfungsi sebagai pemberi persetujuan terhadap peraturan desa yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan desa. Oleh karena BPD memiliki peranan penting dan tanggung jawab yang besar dalam menentukan peraturan desa, maka anggota BPD harus mempelajari, memahami, menganalisa, dan mempertimbangkan secara matang tentang peraturan desa yang akan dituju tersebut, untuk itu setiap anggota BPD harus mengesampingkan segala kepentingan pribadi, kelompok dan pihak-pihak tertentu dalam persetujuan peraturan desa.

Menurut Arbi Sani dalam Rauf dan Zulfan (2004 : 35), bahwa fungsi BPD yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan legislatif atau pembuat Undang-Undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya dalam pasal-pasal yang dihasilkan dalam waktu yang bersamaan, parlemen pula sebagai unsur pemerintah atau memberi dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga Pemerintahan selain dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang dikandung oleh pasal Undang-Undang yang sama.

Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden (BPD) terhadap fungsi BPD dalam legislasi secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.11 berikut:

Tabel V.11 : Rekapitulasi Tanggapan Responden BPD Tentang fungsi BPD Dalam Legislasi.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Anggota BPD ikut merumuskan peraturan Desa bersama Kepala Desa	4	3	1	1	-	9
		44,44%	33,33%	11,11%	11,11%	-	100%
2	Anggota BPD mengetahui salah satu fungsi dari peraturan BPD	6	3	-	-	-	9
		66,66%	33,33%	-	-	-	100%
3	BPD ikut dalam penetapan peraturan Desa	1	5	3	-	-	9
		11,11%	55,55%	33,33%	-	-	100%
4	BPD ikut dalam merumuskan peraturan adat Desa	1	4	2	2	-	9
		11,11%	44,44%	22,22%	-	-	100%
5	BPD ikut dalam pembatalan peraturan Desa	2	3	3	1	-	9
		22,22%	33,33%	33,33%	11,11%	-	100%
6	Total	14	18	9	4	-	45
		31,11%	40%	20%	8,88%	-	100%
7	Rata-Rata	2,8	3,6	1,8	0,8	-	9
		31,11%	40%	20%	8,88%	-	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2009.*

Dari tabel V.11 di atas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 40% menilai fungsi BPD dalam mengayomi adat-istiadat pada katagori setuju, namun masih ada responden yang tidak setuju yaitu 8,88%.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam legislasi Desa Banjar Seminai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.11 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 40% sudah setuju terhadap pelaksanaan fungsi BPD dalam legislasi Desa Banjar Seminai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota BPD Bapak Wintolo mengatakan bahwa sebagai anggota BPD telah ikut menjalankan fungsi BPD dalam legislasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anggota BPD telah berperan dalam menjalankan salah satu fungsinya hal ini terbukti dengan anggota BPD telah ikut membatalkan peraturan desa yang telah dibuat oleh perangkat desa atau kepala desa.

Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden (masyarakat) terhadap fungsi BPD dalam legislasi secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.12 berikut:

Tabel V.12 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Fungsi BPD Dalam Legislasi.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Mengetahui kewenangan BPD	4	23	12	4	1	44
		9,09%	52,27%	27,27%	9,09%	2,27%	100%
2	Ikut dalam rapat yang diadakan BPD	3	15	9	11	6	44
		6,81%	34,09%	20,45%	25%	13,63%	100%
3	Mengetahui banyaknya rapat yang diadakan BPD	3	7	21	9	4	44
		6,81%	15,90%	47,72%	20,45%	9,09%	100%
4	Mengetahui keputusan yang dibuat BPD	4	9	19	10	2	44
		9,09%	20,45%	43,18%	22,72%	4,54%	100%
5	Mengetahui salah satu peraturan yang dibuat BPD	4	17	12	6	5	44
		9,09%	38,63%	27,27%	13,63%	11,36%	100%
6	Total	18	71	73	40	18	220
		8,18%	32,27%	33,18%	18,18%	8,18%	100%
7	Rata-Rata	3,6	14,2	14,6	8	3,6	44
		8,18%	32,27%	33,18%	18,18%	8,18%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2009.*

Dari tabel V.12 di atas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 33,18% menilai fungsi BPD dalam legislasi pada katagori ragu-ragu, namun masih ada responden yang tidak setuju yaitu 18,18%, sedangkan yang sangat tidak setuju sebanyak 8,18%.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam legislasi Desa Banjar Seminai belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel V.12 kebanyakan responden menilai ragu-ragu 33,18% pelaksanaan fungsi BPD dalam legislasi Desa Banjar Seminai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Bapak Teguh mengatakan bahwa fungsi BPD dalam legislasi kurang berfungsi, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui fungsi BPD.

Berdasarkan uraian di atas dapat di bandingkan bahwa fungsi BPD dalam legislasi ada dua pendapat yaitu bahwa tanggapan responden BPD menyatakan bahwa fungsi BPD dalam legislasi telah berfungsi dengan baik, karena tanggapan responden BPD telah menjawab setuju, namun berbeda dengan tanggapan responden masyarakat yang menyatakan bahwa fungsi BPD dalam legislasi kurang berfungsi karena responden masyarakat banyak yang menjawab ragu-ragu, hal ini di karenakan banyaknya masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti rapat BPD. Hal ini didukung dengan adanya rapat-rapat BPD yang dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel V.13 : Rapat Yang Di Selenggarakan Anggota BPD Di Desa Banjar Seminai.

No	Tanggal	Jenis rapat	Jumlah anggota rapat			tempat
			Masyarakat	BDP	RT/RW	
1.	3-01-2010	Rapat rutin bulanan BPD.	7	9	10	Balai desa
2.	19-10-2007	Rapat untuk menanggapi usulan masyarakat supaya SMP di ubah menjadi negri.	8	8	7	Kantor desa
3.	16-02-2009	Rapat untuk pembuatan taruf kepada kades.	10	04	10	Balai desa
4.	28-04-2009	Rapat untuk membahas penyelesaian honor anggota BPD.	10	05	10	Kantor desa

Sumber : Data lapangan tahun 2010

Dari tabel diatas dilihat bahwa dalam empat (4) kali kegiatan rapat yang di adakan oleh anggota BPD, tidak seluruh masyarakat undangan yang hadir. Di mana pada tanggal 03 januari 2010 dari 25 orang masyarakat yang di undang hanya 7 orang yang mengikuti rapat, tanggal 19 oktober 2007 dari 20 orang masyarakat yang di undang hanya 8 orang yang hadir. tanggal 16 febuari 2009 dari 30 orang masyarakat yang di undang hanya 10 orang yang hadir. Tanggal 28 april 2009 dari 25 orang masyarakat yang di undang hanya 10 orang yang hadir . Yang menyebabkan ketidak hadiran ini yaitu kurangnya komunikasi antara anggota BPD dengan masyarakat dan tidak adanya kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri dalam fungsi BPD itu sendiri.

Fungsi BPD dalam legislasi yang mencirikan Demokrasi Moderen ini memperkenalkan sebagai wakil rakyat. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa fungsi BPD dalam legislasi sangatlah mempunyai peran penting untuk pembangunan di sebabkan BPD berperan penting dalam peraturan Desa, misalnya merumuskan rancangan peraturan Desa tentang pendapatan asli Desa (PAD), kekayaan Desa dan juga ikut menetapkan anggaran pendapatan belanja (APB) Desa dari hal ini dapat dilihat fungsi BPD dalam pembangunan di Desa Banjar Seminai sangat di dukung dengan adanya fungsi BPD dalam legislasi.

V.2.3 Pengawasan

Setelah melaksanakan fungsi mengayomi dan fungsi legislasi, maka BPD juga diberikan tugas untuk mengawasi jalannya peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Menurut S.P Siagian (2001 : 49) pengawasan adalah merupakan langkah dan sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Menurut Kartini kartono (2002 : 153) memberikan pengertian pengawasan adalah Pada umumnya para pengikut dapat bekerjasama dengan baik kearah pencapaian sasaran – sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk

mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan - penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan tersebut.

Kegiatan pengawasan yang harus dilakukan oleh anggota BPD ialah menilai kerja pemerintah desa apakah telah sesuai dengan perencanaan masing - masing indikator yang menjadi objek pengawasan. Dari penilaian tersebut nantinya akan diketahui apakah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tersebut telah sesuai dengan hasil yang diharapkan bersama.

Selanjutnya kegiatan pengawasan BPD ini adalah, melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap masalah-masalah yang ditemui dilapangan untuk ditindak lanjuti, agar untuk masa yang akan datang tidak akan terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada objek yang sama.

Oleh karena itu, dalam hal pengawasan ini banyak cara yang dapat dilakukan oleh lembaga legislati ini, sehingga pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya merasa tidak sendiri, namun ada lembaga lainnya yang berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing yang salah satunya adalah BPD yang kan mengawasi setiap kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden (BPD) terhadap fungsi BPD dalam pengawasan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.14 berikut:

Tabel V.14 : Rekapitulasi Tanggapan Responden BPD Tentang Fungsi BPD Dalam Pengawasan.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Mengetahui tugas Kepala Desa	5	4	-	-	-	9
		55,55%	44,44%	-	-	-	100%
2	Selalu meminta keterangan Kepala Desa tentang pekerjaan yang telah dilakukan	-	2	6	1	-	9
		-	22,22%	66,66%	11,11%	-	100%
3	Melakukan pengawasan dan pelaksanaan APBD Desa	5	4	-	-	-	9
		55,55%	44,44%	-	-	-	100%
4	Mengetahui seluruh laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepala Desa	5	3	1	-	-	9
		55,55%	33,33%	11,11%	-	-	100%
5	Menjalankan fungsi pengawasan	3	6	-	-	-	9
		33,33%	66,66%	-	-	-	100%
6	Total	18	19	7	1	-	45
		40%	42,22%	15,55%	2,22%	-	100%
7	Rata-Rata	3,6	3,8	1,4	0,2	-	9
		40%	42,22%	15,55%	2,22%	-	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.14 di atas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 42,22% menilai fungsi BPD dalam pengawasan pada katagori setuju, namun masih ada responden yang tidak setuju yaitu 2,22%.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan di Desa Banjar Seminai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat

pada tabel V.14 kebanyakan responden menilai setuju 42,22% pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan Desa Banjar Seminai. Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden (Masyarakat) terhadap fungsi BPD dalam pengawasan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.15 berikut:

Tabel V.15 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Fungsi BPD Dalam Pengawasan.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Ada peraturan Desa	15	26	2	1	-	44
		34,09%	59,09%	4,54%	2,27%	-	100%
2	BPD telah melakukan pengawasan terhadap peraturan Desa	5	20	19	-	-	44
		11,36%	45,45%	43,18%	-	-	100%
3	Di dalam peraturan Desa ada keputusan Desa	2	12	26	3	1	44
		4,54%	27,27%	59,09%	6,81%	2,27%	100%
4	BPD melakukan pengawasan dari keputusan Desa	4	22	16	2	-	44
		9,09%	50%	36,36%	4,54%	-	100%
5	Dapat menerima seluruh laporan pertanggung jawaban Kepala Desa	5	10	12	15	2	44
		11,36%	22,72%	27,27%	34,09%	4,54%	100%
6	Total	31	90	75	21	3	220
		14,09%	40,90%	34,09%	9,54%	1,36%	100%
7	Rata-Rata	6,2	18	15	4,2	0,6	44
		14,09%	40,90%	34,09%	9,54%	1,36%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2010.

Dari tabel V.15 di atas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 40,90% menilai fungsi BPD dalam pengawasan pada kategori setuju, namun

masih ada responden yang tidak setuju yaitu 9,54% dan yang sangat tidak setuju 1,36%.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan di Desa Banjar Seminai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel V.15 kebanyakan responden menilai setuju 40,90% pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan Desa Banjar Seminai.

Berdasarkan uraian di atas dapat di bandingkan bahwa fungsi BPD dalam pengawasan telah berjalan dengan baik, karena tanggapan responden PBD dan responden masyarakat telah mengatakan setuju dengan fungsi BPD dalam pengawasan.

Hal ini di dukung dengan adanya aturan-aturan desa yang telah di patuhi oleh masyarakat, misalnya adanya kegiatan gotong royong yang di adakan 2 bulan sekali, adanya pos ronda dan siskamling serta lain-lain.

Dalam pembangunan sangatlah di perlukan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik maka dari itu fungsi BPD dalam pengawasan sangatlah dibutuhkan dalam pembangunan Desa Banjar Semiani untuk mendukung kemajuan.

V.2.4 Menyampaikan Aspirasi

Menampung dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi berwenang. Dalam fungsinya ini Badan Permusyawartaan Desa harus mengetahui dan menampung apa saja yang diterima masyarakat baik itu ide

atau gagasan didalam pelaksanaan pembangunan ataupun dalam tahap perencanaan pembangunan.

Menurut Mukhtar mas'oed dalam Rauf dan zulfan (2004 : 39), bahwa kepentingan rakyat, kebutuhan, keinginan, nilai-nilai dan harapan mereka bisa dipenuhi tetapi juga bisa dikecewakan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Warga Negara sangat memperhatikan dan berkepentingan dengan keputusan yang dibuat pemerintah. Mereka menyatakan atau mengartikulasikan kepentinagn mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

Pendapat diatas memberikan gambaran bahwa keinginan masyarakat khususnya masyarakat desa untuk memberikan aspirasinya kepada BPD maupun pemerintah desa adalah agar keinginan-keinginan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah desa dapat lebih sesuai dan diperhatikan oleh pemerintah, sehingga desa baik melalui individu, atau kelompok-kelompoknya akan menyampaikan aspirasi dan kepentingannya kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada pemerintah desa sebagai unsur pemerintahan desa.

Konsekuensi pelaksanaan yang mengidentifikasi fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkembang ditengah masyarakat atau yang terjadi dilapangan untuk menampung dan menyalurkan, setelah anggota BPD

mengetahui kondisi objektif yang dialami masyarakat secara kongkrit melalui musyawarah.

Jadi anggota BPD Banjar Seminai telah mengadakan tugasnya menyalurkan aspirasi masyarakat atau fungsi lainnya sebagaimana layaknya lembaga perwakilan masyarakat desa, hanya saja dalam realisasinya belum optimal dan konsekuensinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat Desa Banjar Seminai.

Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden (BPD) terhadap fungsi BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.16 berikut:

Tabel V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden BPD Tentang Fungsi BPD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Mengetahui salah satu fungsi BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat	3	6	-	-	-	9
		33,33%	66,66%	-	-	-	100%
2	Akan menyalurkan aspirasi masyarakat	3	6	-	-	-	9
		33,33%	66,66%	-	-	-	100%
3	Serius dalam menanggapi aspirasi masyarakat	3	4	2	-	-	9
		33,33%	44,44%	22,22%	-	-	100%
4	Turun ke masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat	-	5	4	-	-	9
		-	55,55%	44,44%	-	-	100%
5	Mengetahui kemana akan menyampaikan aspirasi masyarakat	5	4	-	-	-	9
		55,55%	44,44%	-	-	-	100%
6	Total	14	25	6	-	-	45
		31,11%	55,55%	13,33%	-	-	100%
7	Rata-Rata	2,8	5	1,2	-	-	9
		31,11%	55,55%	13,33%	-	-	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.16 di atas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 55,55% menilai fungsi BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat pada kategori setuju, namun masih ada responden yang ragu-ragu yaitu 13,33%, namun sebaliknya tidak ada satu pun responden yang menilai tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di Desa Banjar Seminai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel V.16 kebanyakan responden menilai setuju 55,55% pelaksanaan fungsi BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Banjar Seminai.

Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden (masyarakat) terhadap fungsi BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.17 berikut.

Tabel V.17 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Fungsi BPD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Pernah memberikan masukan atau aspirasi pada BPD	11	22	3	5	3	44
		24%	50%	6,81%	11,36%	6,81%	100%
2	Jika menjadi BPD akan menyalurkan aspirasi masyarakat	20	21	2	-	1	44
		45,45%	47,72%	4,54%	-	2,27%	100%
3	BPD langsung turun kelapangan dalam menyerap aspirasi masyarakat	16	18	9	-	1	44
		36,36%	40,90%	20,45%	-	2,27%	100%
4	Aspirasi yang disampaikan mendapatkan tanggapan	5	12	16	8	3	44
		11,36%	27,27%	36,36%	18,18%	6,81%	100%
5	Aspirasi yang datang dari golongan manapun di tanggap BPD	21	18	3	-	2	44
		47,72%	40,90%	6,81%	-	4,54%	100%
6	Total	73	91	33	13	10	220
		33,18%	41,36%	15%	5,90%	4,54%	100%
7	Rata-Rata	14,6	18,2	6,6	2,6	2	44
		33,18%	41,36%	15%	5,90%	4,54%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.17 di atas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 41,36% menilai fungsi BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat pada kategori setuju, namun masih ada responden yang menilai tidak setuju 5,90% dan sangat tidak setuju 4.54%.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di Desa Banjar Seminai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel V.17 kebanyakan responden menilai setuju 41,36% pelaksanaan fungsi BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Banjar Seminai.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibandingkan bahwa fungsi BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat telah berjalan dengan baik karena tanggapan responden PBD dan responden masyarakat telah mengatakan setuju dengan fungsi BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

Hal ini didukung dengan adanya aspirasi masyarakat yang hadir dari golongan manapun selalu di tanggap oleh anggota BPD itu sendiri.

Fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan mempunyai peran penting di karenakan aspirasi masyarakat sangat membantu berjalannya pembangunan di Desa Banjar Seminai. karena aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan agar pembangunan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

V.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Hasil Rekapitulasi Hasil Angket tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

V.3.1 Rekapitulasi Hasil Angket BPD

Tabel V.18 : Rekapitulasi Hasil Angket tentang Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Mengayomi	3	21	18	1	2	45
		6,66%	46,66%	40%	2,22%	4,44%	100%
2	Legislasi	14	18	9	4	-	45
		31,11%	40%	20%	8,88%	-	100%
3	Pengawasan	18	19	7	1	-	45
		40%	42,22%	15,55%	2,22%	-	100%
4	Menyampaika n Aspirasi Masyarakat	14	25	6	-	-	45
		31,11%	55,55%	13,33%	-	-	100%
5	Total	49	83	40	6	2	180
		27,22%	46,11%	22,22%	3,33%	1,11%	100%
6	Rata-Rata	12,25	20,75	10	1,5	0,5	45
		27,22%	46,11%	22,22%	3,33%	1,11%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.18 di atas tentang rekapitulasi tanggapan responden terhadap Peranan BPD Dalam Pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berdasarkan fungsinya, ternyata kebanyakan responden yaitu 46,11% menilai sudah setuju, namun masih ada responden yang tidak setuju yaitu 3,33%, bahkan ada responden yang sangat tidak setuju sama sekali yaitu 1,11%.

Dari rekapitulasi hasil angket peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak diatas dapat dilihat bahwa :

1. Fungsi mengayomi. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsi mengayomi telah berfungsi yang terlihat dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 21 dari 45.
2. Fungsi legislasi. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsi legislasi berfungsi yang terlihat dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 18 dari 45.
3. Fungsi pengawasan. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsi pengawasan berfungsi yang terlihat dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 19 dari 45.
4. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsi menyalurkan aspirasi berfungsi yang terlihat dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 25 dari 45.

V.3.2 Rekapitulasi Hasil Angket Masyarakat

Tabel V.19 : Rekapitulasi Hasil Angket tentang Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Mengayomi	22	97	83	15	3	220
		10%	44,09%	37,72%	6,81%	1,36%	100%
2	Legislasi	18	71	73	40	18	220
		8,18%	32,27%	33,18%	18,18%	8,18%	100%
3	Pengawasan	31	90	75	21	3	220
		14,09%	40,90%	34,09%	9,54%	1,36%	100%
4	Menyampaika n Aspirasi Masyarakat	73	91	33	13	10	220
		33,18%	41,36%	15%	5,90%	4,54%	100%
5	Total	144	349	264	89	34	880
		16,36%	39,65%	30%	10,11%	3,86%	100%
6	Rata-Rata	36	87,25	66	22,25	8,5	220
		16,36%	39,65%	30%	10,11%	3,86%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.19 di atas tentang rekapitulasi tanggapan responden terhadap Fungsi BPD Dalam Pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berdasarkan fungsinya, ternyata kebanyakan responden yaitu 39,65% menilai sudah setuju, namun masih ada responden yang tidak setuju yaitu 10,11%, bahkan ada responden yang sangat tidak setuju sama sekali yaitu 3,86%.

Dari rekapitulasi hasil angket peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak diatas dapat dilihat bahwa :

1. Fungsi mengayomi. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsi mengayomi telah berfungsi yang terlihat dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 97 dari 220.
2. Fungsi legislasi. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsi legislasi tidak berfungsi yang terlihat dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 73 dari 220.
3. Fungsi pengawasan. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsi pengawasan berfungsi yang terlihat dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 90 dari 220.
4. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsi menyalurkan aspirasi berfungsi yang terlihat dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 91 dari 220.

V.4 Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Adapun pelaksanaan fungsi BPD dalam pembangunan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, masih belum berjalan dengan maksimal sesuai yang di harapkan, maka penulis akan menguraikan analisa dan temuan di lapangan penelitian mengenai hambatan – hambatan pelaksanaan tersebut.

1. Kurangnya Dana, Sarana dan Prasarana

Tidak ada suatu organisasi yang hidup tanpa ada sumber dana. Merupakan suatu kenyataan bahwa dari semua bentuk organisasi baik dari pemerintah maupun bukan,

harus dihadapkan pada keterbatasan dana. Berdasarkan hasil wawancara Kepala BPD di Desa Banjar Seminai yaitu Bapak SARYONO dirumahnya bahwa :

BPD memiliki keterbatasan dan untuk bergerak melaksanakan tugas dan fungsinya. Dana yang diperoleh dari Pemda Kabupaten Siak yang setiap tahunnya diberikan tidak mencukupi .Selain itu tidak terdapatnya kantor, itu salah satu penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Keterbatasan dan minimnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa. Demikian juga dengan BPD di Desa Banjar Seminai yang tidak memiliki kantor, sehingga setiap menyelenggarakan rapat dilakukan dari rumah ke rumah dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Selain itu sarana kantor meja, kursi, lemari tempat penyimpanan arsip yang tidak dimilikinya.

2. Kurangnya Koordinasi

Koordinasi merupakan menyesuaikan diri dari bagian-bagian satu sama serta pekerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil yang keseluruhan. Koordinasi sangat penting dilakukan oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa, namun pada kenyataannya dilapangan anggota BPD mempertahankan ide dan gagasan berdasarkan kepentingan masing-masing. Dan selain itu Anggota Badan Permusyawaratan Desa ini di sibukkan oleh aktivitasnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua BPD yaitu Bapak BUDIMAN mengatakan :

“ Anggota BPD kepadatan jadwal kerja Pegawai dan tugasnya masing-masing, sehingga kurang koordinasi yang maksimal dalam menjalankan perannya sebagai anggota BPD. “

Tidak adanya koordinasi yang memungkinkan komunikasi menjadikan kevakuman dalam berinteraksi. Yang terpenting adalah Komitmen dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan dari masyarakat desa kurang diterapkan dalam diri masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa dan mereka lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Oleh karena itu, hendaknya ada kerja sama yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Namun Badan Permusyawaratan Desa menunjukkan kondisi serba kekurangan baik infrastruktur maupun pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia, demikian juga dengan kondisi Pemerintahan Desa.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di Desa Banjar Seminai tergolong rendah, hal ini terlihat dengan tidak antusiasnya masyarakat untuk hadir dan aktif dalam menyampaikan ide-ide atau gagasan dan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa. Hal ini disebabkan, masyarakat tidak menyadari bahwa pentingnya rapat dalam rangka menampung

aspirasi masyarakat Desa Banjar Seminai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota BPD yaitu Bapak Sugiyono yang menyatakan :

“ Warga Masyarakat Desa Banjar Seminai kurang aktif dalam mengikuti rapat BPD”

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Fungsi BPD meliputi mengayomi dan menjaga kelestarian adat-istiadat, legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan. Sebagaimana yang terdapat di bawah ini.

a. Mengayomi adat-istiadat

Fungsi BPD Di Desa Banjar Seminai di dalam mengayomi adat-istiadat berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari jawaban 21 responden (BPD) atau 46,66% dan responden (masyarakat) 97 atau 44,09% .Dengan alasan bahwa BPD telah ikut membina adat di Desa Banjar Seminai misalnya melestarikan adat di masyarakat dan membina lembaga-lembaga adat serta mendukung keputusan lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

b. legislasi

Fungsi BPD di Desa Banjar Seminai terhadap legislasi kurang berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden (masyarakat) 73 atau 33,18% ragu-ragu yang menyatakan demikian, karena semenjak BPD berdiri hingga sekarang belum pernah membuat peraturan desa,

kecuali peraturan desa yang berkaitan dengan penggunaan anggaran desa.

c. Pengawasan

Fungsi BPD di Desa Banjar Seminai terhadap pengawasan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari jawaban 19 responden (BPD) atau 42,22% dan responden masyarakat 90 atau 40.90% yang menyatakan demikian, dengan alasan BPD berperan dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa yang dijalankan oleh kepala desa.

d. Menampung aspirasi

Fungsi BPD di Desa Banjar Seminai terhadap menampung dan menyalurkan aspirasi berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari jawaban 25 responden (BPD) atau (55,55%) dan responden (masyarakat) 91 atau 41,36% yang menyatakan demikian, karena setiap masyarakat menyalurkan aspirasi, anggota BPD kurang menanggapinya.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa fungsi BPD dalam mengayomi adat-istiadat sudah berjalan dengan baik, namun fungsi BPD dalam legislasi tidak berfungsi dengan baik, sedangkan fungsi BPD dalam pengawasan sudah berjalan dengan baik, begitu pula

dengan fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat telah berjalan dengan baik.

2 Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah :

- a. Kurangnya dana, sarana dan prasarana yang menyebabkan keterbatasan untuk bergerak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena dana yang diperoleh dari Pemda Kabupaten Siak yang setiap tahunnya diberikan tidak mencukupi. Dan keterbatasan serta minimnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan BPD.
- b. Kurangnya koordinasi yang disebabkan oleh kesibukan aktivitasnya masing-masing, sehingga kurangnya koordinasi yang maksimal dalam menjalankan peran sebagai anggota BPD.
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat, yang terlihat pada ketidakikutsertaan masyarakat untuk hadir dan aktif dalam menyampaikan gagasan atau ide dan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa.

VI.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis kepada BPD di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah :

1. Diharapkan BPD di Desa Banjar Seminai mampu menjalankan fungsinya secara maksimal maka dituntun kepada anggota BPD melakukan sejenis

pembinaan pendidikan formal atau mengikuti pelatihan-pelatihan secara insentif agar dapat dan mampu melakukan tugas-tugasnya secara lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

2. Agar pelaksanaan fungsi berjalan dengan baik, maka harus didukung oleh dana, sarana dan prasarana yang memadai. Maka diharapkan pemerintah desa dapat membantu sarana dan prasarana penunjang bagi BPD. Dapat juga dilakukan meminta bantuan kepada Pemerintah terkait dalam mencukupi sarana dan prasarana yang masih kurang tersebut.
3. Kepada BPD Banjar Seminai agar menjalankan fungsinya sesuai dengan tata tertib yang diberlakukan dari pihak Kabupaten Siak, karena anggota BPD dipilih oleh masyarakat secara demokratis demi terciptanya otonomi desa.
4. Agar pelaksanaan pembangunan di Desa Banjar Seminai dapat berjalan dengan baik, maka dituntut adanya kerja sama antara BPD dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Mac. Colin *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan*. Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Alfian, Sebagai *Lembaga Penyalur Aspirasi Masyarakat Badan Perwakilan Desa Perlu Mengadakan Rapat Atau Dengar Pemdapat*, Gramedia, Jakarta, 1985
- Anwar Khairul, Muhammad Ras Muis. *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*, Unri Pres 2003
- Achmadi Abu dan Cholid Nurbuko, *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Handoko Hani, *Manajemen*. BPFE. Yogyakarta, 2000
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori. Konsep, dan Pengembangannya*, PT Rajawali, Pers Jakarta , 2006
- Ndraha, Taliziduha. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta, 1991
- Thoha, Miftah. *Kepemimpinan Dan Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, Sinar Baru, Bandung 1990
- Pembudi, Himawan.S dkk, *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Laperra, Yogyakarta, 2003
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.9 Tahun 2007, tentang *Badan Permusyawaratan Desa*
- Rivai Veithzal. *Kepemimpinan*. Grafindo Persada. Jakarta, 2004
- Santowo, Purwo. *Pembaharuan Desa Secara Partisipasif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Siagian , Sondang P, *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara, 2000
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Soekanto, Soejono *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Edisi Baru. cet.38.PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Undang-Undang Otonomi Daerah*. No.32 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005, Tentang Peraturan Desa*
- Peraturan Daerah Kab. Siak Nomor 08 Tahun 2006*